

DAFTAR ISI

	Halaman
DAFTAR ISI	ii
BAB 1 PENDAHULUAN	1
1. 1. Dasar Pemikiran	1
1. 2. Pengertian	2
1. 3. Maksud dan Tujuan	2
1. 4. Landasan	3
1. 5. Sistematika Penulisan	4
BAB 2 KONDISI UMUM	5
2.1. Kondisi Saat Ini	5
A. Potensi Daerah	5
B. Sosial Budaya	8
C. Ekonomi	9
D. Infrastruktur, Permukiman dan Lingkungan	12
E. Pemerintahan	13
2.2. Tantangan Pembangunan	14
A. Pemanfaatan Potensi	14
B. Bidang Sosial	14
C. Bidang Ekonomi	15
D. Infrastruktur, Permukiman dan Lingkungan	16
E. Pemerintahan	17
BAB 3 VISI, MISI, DAN TUJUAN	19
3. 1. Visi	19
3. 2. Misi	20
3. 3. Tujuan	20
BAB 4 ARAH PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG 2005-2025	24
4. 1. Terwujudnya Kehidupan Beragama dan Norma Adat Berlandaskan Prinsip Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah, Syarak Mangato, Adat Mamakai....	24
4. 2. Terwujudnya Tata Pemerintahan Yang Baik	25
4. 3. Terwujudnya Sumberdaya Manusia Berkualitas	26
4. 4. Terwujudnya Masyarakat Yang Sejahtera, Sesuai dengan Potensi dan Kondisi Daerah.	27
4. 5. Terwujudnya Pemerataan Sarana dan Prasarana Perekonomian Untuk Mempercepat Pencapaian Agama Mandiri yang Berprestasi Madani	28
BAB 5 PENUTUP	33

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1. Dasar Pemikiran

Pembangunan daerah kabupaten dan kota merupakan bagian yang integral dari pembangunan provinsi dan pembangunan nasional. Kebijakan pembangunan provinsi yang terdiri dari sejumlah kabupaten dan kota haruslah merupakan penjabaran dari kebijakan pembangunan nasional. Sedangkan kebijakan pembangunan kabupaten dan kota merupakan penjabaran kebijakan pembangunan provinsi. Oleh karena itulah dinyatakan bahwa kebijakan pembangunan kabupaten dan kota merupakan bagian yang integral dari kebijakan pembangunan provinsi dan kebijakan pembangunan nasional.

Agar terjaminnya integrasi pembangunan nasional, provinsi dan daerah, pemerintah telah mengeluarkan Undang-Undang No 25/ 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN). Undang-undang ini mewajibkan setiap daerah mempunyai dokumen Perencanaan Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Kemudian juga ditegaskan bahwa penyusunan masing-masing dokumen tersebut harus berpedoman kepada RPJP Nasional, RPJM Nasional dan Rencana Kerja Pemerintah (RKP).

Sesuai dengan ketentuan Undang-undang Nomor 25/2004 menegaskan bahwa setiap daerah harus menyusun RPJP Daerah berdasarkan RPJPN. Dengan ketentuan kedua Undang-undang ini, maka pemerintah Kabupaten Agam harus mempunyai dokumen RPJPD 2006-2025.

RPJP Kabupaten Agam 2006-2025 ini mengakomodasi semua aturan yang ada untuk mencapai keterkaitan antara RPJP, RPJM, RKP, dan RAPBD. Namun fokus dokumen perencanaan ini adalah perspektif jangka panjang yang ingin diwujudkan berdasarkan kemajuan yang telah dicapai, ketersediaan sumber daya alam, pengaruh faktor eksternal dan faktor internal

1. 2. Pengertian

Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Kabupaten Agam adalah dokumen perencanaan yang memuat tujuan dan sasaran pembangunan daerah yang ingin diwujudkan selama periode 2006-2025. Dokumen ini mencakup visi, misi dan arah pembangunan Kabupaten Agam untuk masa 20 tahun ke depan yang mengacu pada RPJP Nasional. RPJP ini menjadi dasar penyusunan RPJM (Rencana Pembangunan Jangka Menengah) Kabupaten Agam 2006-2010 dan seterusnya.

1. 3. Maksud dan Tujuan

RPJP 2006-2025 ini ditetapkan dengan maksud: (1) memberikan arah pelaksanaan pembangunan daerah lima tahunan yang disebut sebagai RPJM, dan (2) menjaga keberlanjutan konsep pembangunan daerah dalam jangka panjang (dalam jangka waktu 20 tahun ke depan). Keberlanjutan rencana pembangunan dalam jangka waktu yang relatif panjang akan mempunyai dampak positif terhadap pencapaian tujuan pembangunan daerah.

1. 4. Landasan

Pancasila adalah merupakan landasan idiil dalam penyusunan RPJP ini. Sedangkan landasan konstitusionalnya adalah UUD 1945. Disamping itu, akan digunakan pula sebagai landasan hukumnya adalah:

- Undang-undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Kabupaten Agam
- Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 No 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No 4286)
- Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004, Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355).
- Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No 4400)

- Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421)
- Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437)
- Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pusat dengan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438)
- Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952)
- PP Nomor 105 Tahun 2000 tentang “Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah”
- Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2001 tentang Pelaporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4124)
- Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah.
- PP Nomor 21 Tahun 2004 tentang “Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga.
- Peraturan Presiden RI Nomor 7 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional

1. 5. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan RPJP Kabupaten Agam 2006-2025 adalah seperti berikut:

Bab 1. Pendahuluan

Bab 2 : Kondisi Umum

Bab 3 : Visi, Misi dan Tujuan Pembangunan Daerah 2006-2025

Bab 3 : Arah Pembangunan Jangka Panjang Tahun 2006-2025

Bab 4 : Penutup

BAB 2

KONDISI UMUM

2.1. Kondisi Saat Ini

Pembangunan yang telah dilaksanakan di Kabupaten Agam selama ini telah dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat, kualitas sumberdaya manusia, kualitas pelayanan publik dan kesadaran masyarakat untuk berpartisipasi dalam pembangunan daerah. Selanjutnya peningkatan kesejahteraan masyarakat dan kualitas sumberdaya telah mendorong terjadinya transformasi dalam berbagai bidang pembangunan.

Meskipun telah banyak kemajuan dicapai dalam berbagai bidang, tantangan yang dihadapi Kabupaten Agam untuk masa mendatang cukup berat. Pembangunan di masa mendatang dihadapkan pada berbagai persoalan internal dan eksternal. Kemajuan pembangunan Kabupaten Agam di masa mendatang ditentukan oleh perkembangan faktor internal dan eksternal dan kondisi pembangunan yang telah dicapai sampai saat ini. Faktor internal yang sangat menentukan adalah ketersediaan sumber-sumber pembangunan, kualitas sumberdaya manusia, kualitas infrastruktur dan kebijakan pemerintah daerah.

Faktor eksternal yang paling berat dihadapi adalah perkembangan pembangunan daerah-daerah yang bertetangga dengan Kabupaten, persaingan antar daerah dan globalisasi ekonomi. Diantara faktor eksternal yang akan mempengaruhi langsung pembangunan Kabupaten Agam di masa mendatang adalah Bandara Internasional Minangkabau dan pembangunan jalan layang Kelok Sembilan. Kedua pembangunan ini akan memberi peluang yang sangat besar untuk meningkatkan mobilitas barang dan orang dari dan keluar Kabupaten Agam di masa mendatang. Peningkatan mobilitas orang dan barang tersebut akan dapat mempercepat transformasi pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Agam.

Perkembangan pembangunan Kota Bukittinggi juga sangat memberi peluang untuk mempercepat transformasi ekonomi Kabupaten Agam. Kota Bukittinggi mempunyai keterkaitan ekonomi, transportasi, sosial, budaya dan pelayanan publik yang sangat kuat dengan Kabupaten Agam, terutama kecamatan-kecamatan yang langsung bertetangga dengan wilayah administrasi

Kota Bukittinggi. Oleh sebab itu perkembangan ekonomi, sosial, transportasi dan pelayanan publik di Kota Bukittinggi secara otomatis akan mempengaruhi proses pembangunan Kabupaten Agam di masa mendatang.

Selanjutnya hasil pembangunan yang telah dicapai sampai saat ini dapat mempercepat proses pembangunan dan peningkatan kesejahteraan generasi mendatang lebih cepat. Sebaliknya hasil pembangunan yang dicapai tersebut tidak akan memberi manfaat kepada generasi mendatang, seandainya tidak dikelola dengan manajemen yang baik. Oleh sebab itu perlu diketahui kondisi potensi daerah dan keadaan sosial ekonomi daerah saat ini.

A. Potensi Daerah

a. Sumber Daya Alam

- Luas daerah 2.230,30 km persegi dengan ketinggian dari permukaan laut antara 20⁰C - 30⁰C. Kelembaban udara rata-rata sekitar 88 persen dengan kecepatan angin antara 4 - 20 km/jam. Topografi daerah terdiri dari wilayah datar dengan kemiringan 0⁰ - 3⁰ seluas 662 km, wilayah berombak dengan kemiringan 3⁰ - 8⁰ seluas 153 km persegi, dan wilayah bergelombang dengan kemiringan 8⁰ - 15⁰ seluas 801 km persegi serta wilayah berbukit dengan kemiringan 15 atau lebih seluas 153 km persegi.
- Disamping daratan, terdapat pula lautan yang memiliki dua pulau (pulau Tengah dan Pulau Ujung dengan luas satu km persegi masing-masingnya) dan sebuah danau (Danau Maninjau) dengan luas 9,950 ha dan kedalaman 157 m. Dua gunung yaitu Gunung Merapi dan Gunung Singgalang dengan ketinggian sekitar 2.891 m dan 2.877 m masing-masingnya.
- Sekitar 141.035 ha dari luas daerah adalah merupakan lahan yang telah diusahakan. Diantaranya adalah: (1) sawah (35.714,54 ha), (2) perkebunan rakyat (27.358,52 ha), (3) perkebunan besar (34.131,00 ha) dan (4) pengairan (11.087,75 ha). Sekitar 31% dari luas daerah adalah merupakan daerah hutan dan semak belukar.
- Disamping potensi pertanian yang dimiliki, terdapat pula potensi wisata yang cukup besar. Potensi wisata tidak terbatas pada gunung dan danau saja, tetapi juga potensi wisata bahari. Semua potensi wisata tersebut merupakan modal dasar bagi Kabupaten Agam untuk berkembang lebih cepat dari daerah kabupaten lainnya di Sumatera Barat.

- Keberadaan Gunung Merapi telah membuat sebahagian wilayah Kabupaten Agam menjadi subur untuk pengembangan berbagai jenis produk pertanian, baik untuk konsumsi dalam daerah, luar daerah maupun untuk tujuan pasar luar negeri.

b. Sumber Daya Manusia

- Dengan luas daerah sekitar 2.232,3 km per segi dan jumlah penduduk sekitar 431 603 orang tahun 2004. Kepadatan penduduk mencapai 194 orang per Km². Kepadatan penduduk ini relatif rendah untuk daerah kabupaten di Sumatera Barat.
- Laju pertumbuhan penduduk Kabupaten Agam selama periode 1990-2000 hanya mencapai rata-rata 0,18 % per tahun. Namun laju pertumbuhan tersebut mengalami peningkatan menjadi rata-rata 0,8 % per tahun selama periode 2000-2004.
- Distribusi penduduk tidak merata menurut kecamatan. Kecamatan Banuhampu Sungai Puar, Candung dan Baso termasuk daerah yang padat penduduknya. Sedangkan kecamatan Palembayan, Palupuh, dan Ampek Nagari termasuk daerah berpenduduk jarang. Perbedaan kepadatan penduduk ini juga mempunyai implikasi terhadap konsentrasi kegiatan ekonomi penduduk. Kegiatan ekonomi non pertanian lebih berkembang di kecamatan yang mempunyai kepadatan penduduk tinggi.
- Kualitas penduduk Kabupaten Agam yang diperlihatkan oleh indikator Indeks Pembangunan Manusia (IPM) mengalami peningkatan dari 66,3 pada tahun 1999 menjadi 68,0 pada tahun 2002. Indeks ini lebih tinggi dari rata-rata Sumatera Barat baik pada tahun 1999 maupun tahun 2002, tetapi masih lebih rendah dari rata-rata daerah kota. Dengan demikian secara umum dapat dinyatakan bahwa kualitas penduduk Kabupaten Agam relatif lebih baik dari daerah kabupaten lainnya di Provinsi Sumatera Barat.
- Faktor sosial budaya telah berakibat pada tingginya minat penduduk untuk pergi atau mencari penghasilan di daerah lain (merantau). Sekitar 15 persen penduduk Kabupaten Agam berada di luar daerah. Kehidupan mereka pada umumnya lebih baik dibandingkan dengan penduduk yang tinggal di daerah.

- Pada beberapa daerah, perantau Agam telah berhasil mendirikan organisasi paguyuban perantau Agam. Ada diantaranya yang menggunakan nama Agam dan ada pula yang menggunakan nama kecamatan bahkan kenagarian. Kesemua ini adalah merupakan potensi sumberdaya manusia Kabupaten Agam yang secara potensial akan mempercepat proses pembangunan ekonomi daerah.

B. Sosial Budaya

- Mobilitas penduduk relatif tinggi dibandingkan daerah lain. Ini disebabkan oleh semakin terbukanya dan semakin baiknya hubungan transportasi yang menghubungkan Kabupaten Agam dengan daerah lain. Daerah yang terbuka secara sosial dan ekonomi akan lebih cepat maju dibandingkan daerah yang mempunyai akses masuk terbatas.
- Faktor sosial budaya yang berkembang dalam masyarakat memberikan peluang bagi penataan hubungan yang baik antara perantau Agam dengan kampung halamannya. Namun terdapat perbedaan peranan perantau dalam pembangunan menurut kecamatan dan nagari.
- Agama dan adat adalah merupakan perekat hubungan antara masyarakat di kampung dengan perantau di luar daerah. Kegiatan yang bernuansi islami masih bertahan dan bahkan mengalami peningkatan di beberapa nagari. Namun peranan generasi muda dalam meramaikan mesjid relatif masih kurang.
- Peninggalan sejarah, walaupun tidak besar, tetapi dapat dijadikan sebagai potensi daerah dari segi sosial budaya
- Potensi dalam bidang kesenian seperti randai, seni tari dan sebagainya relatif cukup besar. Namun pembinaan dan pengembangan kesenian tradisional ini masih belum mempunyai arah yang jelas. Konsistensi pembinaan dan pengembangan belum terjaga, sehingga mutu dan kualitas kesenian tradisional tersebut hampir tidak mengalami peningkatan selama 10 tahun terakhir. Sebaliknya kesenian moderen mengalami perkembangan yang luar biasa. Bahkan perkembangan dan minat generasi muda yang sangat luar biasa terhadap kesenian moderen merupakan ancaman yang serius terhadap eksistensi kesenian tradisional tersebut.

D. Ekonomi

- Pendapatan per kapita adalah salah satu indikator yang sering digunakan untuk memperlihatkan tingkat kesejahteraan penduduk secara rata-rata. Pendapatan per kapita ril (PDRB per kapita ril berdasarkan harga konstan 1993) Kabupaten Agam telah mengalami peningkatan dari Rp 1.237.260 pada tahun 1993 menjadi Rp 1.714.360 tahun 2003. Selama periode 1993-2003 pendapatan per kapita hanya mengalami peningkatan sebesar rata-rata sebesar 3,0 % per tahun. Selama periode ini pendapatan per kapita Kabupaten Agam belum pernah lebih tinggi dari pendapatan per kapita Sumatera Barat. Tetapi berdasarkan harga konstan 2000, PDRB per kapita Kabupaten Agam telah mengalami peningkatan dari Rp 4.370.432 pada tahun 2000 menjadi Rp 5.094.157 pada tahun 2004. Ini berarti bahwa selama periode 2000-2004 telah terjadi peningkatan PDRB per kapita rata-rata sebesar 3,9 % per tahun. Sementara pada periode yang sama PDRB per kapita Sumatera Barat telah meningkat dari Rp 5.387.059 pada tahun 2000 menjadi Rp 6.203.882 pada tahun 2004. Ini berarti bahwa laju pertumbuhan PDRB per kapita Sumatera Barat rata-rata per tahun hanya sebesar 3,6 %. Dengan demikian pada periode 2000-2004, pendapatan PDRB per kapita Kabupaten Agam masih lebih rendah dari PDRB per kapita Sumatera Barat, tetapi dengan laju pertumbuhannya lebih tinggi dari rata-rata Sumatera Barat. Dengan demikian kesejahteraan rata-rata penduduk Kabupaten Agam lebih rendah dari tingkat kesejahteraan penduduk Sumatera Barat.
- Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Agam rata-rata 5,2 % per tahun selama periode 2001-2004. Laju pertumbuhan ekonomi tersebut lebih tinggi dari laju pertumbuhan ekonomi rata-rata Sumatera Barat dan nasional yang hanya mencapai rata-rata di atas 4,7 % per tahun selama periode 2001-2004. Dengan ukuran pertumbuhan ekonomi, pembangunan Kabupaten Agam selama empat tahun terakhir lebih cepat berkembang dibandingkan dengan rata-rata Sumatra Barat.
- Dalam konteks Sumatera Barat, Kabupaten Agam termasuk kategori daerah relatif maju. Laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Agam relatif tinggi dari laju pertumbuhan ekonomi Sumatera Barat, tetapi pendapatan per kapitanya masih lebih rendah dari rata-rata Sumatera Barat.

- Tingkat monetisasi Kabupaten Agam yang diukur dari perbandingan dana pihak ketiga terhadap PDRB juga relatif rendah. Tetapi LDR Kabupaten Agam relatif tinggi dari rata-rata Sumatera Barat. Bahkan pada tahun 2004 dan 2005 LDR Kabupaten Agam berturut-turut mencapai 126,97 % dan 106,02 %. Rasio kredit/ PDRB di Kabupaten Agam sangat rendah sekali. Misalnya, pada tahun 2004, rasio tersebut hanya mencapai 6,31 %, sementara untuk Sumatera Barat mencapai 19,79%. Ini berarti bahwa penyaluran kredit di Kabupaten Agam masih rendah dan masih dapat ditingkatkan untuk masa mendatang untuk memacu pertumbuhan ekonomi Kabupaten Agam.
- Struktur ekonomi Kabupaten Agam tidak mengalami perubahan selama 10 tahun terakhir. Peranan sektor pertanian mengalami peningkatan dari 30,76 % pada tahun 1996 menjadi 32,05 % pada tahun 2003. Peningkatan sektor pertanian ini antara lain disebabkan oleh peningkatan peranan sektor perkebunan dalam struktur ekonomi Kabupaten Agam. Produksi pertanian bahan makanan tidak hanya untuk kebutuhan dalam daerah, tetapi juga untuk dipasarkan ke luar daerah dan bahkan mungkin dapat dipasarkan ke luar negeri. Selanjutnya laju pertumbuhan sektor pertanian selama dua tahun terakhir lebih tinggi dari laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Agam.
- Sebaliknya peranan sektor industri pengolahan yang diharapkan dapat menggerakkan ekonomi Kabupaten Agam lebih cepat, justru mengalami penurunan dari 17,82 % pada tahun 1996 menjadi 14,30 % pada tahun 2003. Jika struktur ekonomi Kabupaten Agam dihitung berdasarkan harga konstan tahun 2000, peranan sektor industri juga memperlihatkan penurunan dari 15,42 % pada tahun 2000 menjadi 14,36 % pada tahun 2004. Dengan menggunakan kedua sumber data ini, maka dapat dinyatakan bahwa peranan sektor industri di Kabupaten Agam betul-betul mengalami penurunan selama empat tahun terakhir.
- Kabupaten Agam masih menghadapi persoalan kemiskinan yang serius. Tingkat kemiskinan Kabupaten Agam (13,40 %) pada tahun 2004 jauh lebih tinggi dari tingkat kemiskinan Sumatera Barat (10,46). Selanjutnya hasil Pendataan Sosial Ekonomi Penduduk 2005 menunjukkan bahwa hampir 20 % rumah tangga di Kabupaten Agam tergolong miskin. Jumlah rumah tangga miskin di Kabupaten Agam mencapai 8 % dari rumah tangga miskin yang terdapat di provinsi Sumatera Barat.

- Tingkat pengangguran terbuka di Kabupaten Agam rata-rata di bawah 3 % selama 5 tahun terakhir. Tingkat setengah pengangguran yang diukur dengan jumlah jam kerja per minggu mengalami penurunan dari 44,14 % pada tahun 1996 menjadi 41,15 % pada tahun 2004. Meskipun tingkat setengah pengangguran tersebut mengalami penurunan, tingkat setengah pengangguran Kabupaten Agam masih jauh lebih tinggi dari rata-rata Sumatera Barat.

E. Infrastruktur, Permukiman dan Lingkungan

- Panjang jalan yang beraspal telah mengalami peningkatan selama lima tahun terakhir. Pada tahun 2004 sekitar 65 % dari panjang jalan yang terdapat di Kabupaten Agam telah diaspal. Namun sekitar 20 % jalan masih terdiri dari jalan tanah. Jalan dengan kondisi baik pada tahun 2004 baru mencapai 65 %. Kualitas dan lebar jalan ke objek-objek wisata, seperti ke Puncak Lawang telah mengalami peningkatan selama empat tahun terakhir. Perkembangan ini sangat memberi peluang untuk peningkatan kegiatan ekonomi dan arus wisatawan ke objek-objek wisata yang terdapat di wilayah Kabupaten Agam.
- Jumlah kendaraan angkutan penumpang umum mengalami peningkatan rata-rata 6,31 % per tahun. Pertumbuhan jumlah kendaraan jauh lebih cepat dibandingkan dengan laju pertumbuhan penduduk. Dengan demikian rasio penduduk per angkutan penumpang semakin baik.
- Jumlah rumah tangga yang mendapat pelayanan air bersih masih sangat rendah sekali. Sampai pada tahun 2004 baru sekitar 11,6 % rumah tangga yang mendapat pelayanan air bersih. Sumber air bersih sangat diperlukan untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat. Oleh sebab itu rendahnya rumah tangga yang mendapatkan pelayanan air bersih ini akan mempengaruhi derajat kesehatan masyarakat.
- Peningkatan pendapatan masyarakat menuntut penyediaan berbagai fasilitas yang dibutuhkan seperti listrik, alat komunikasi, transportasi, pasar dan lain-lainnya. Sampai tahun 2004 sekitar 91 % rumah tangga di Kabupaten Agam telah menggunakan penerangan listrik. Tingkat pencapaian ini lebih tinggi dari rata-rata Sumatera Barat (82 %).
- Kabupaten Agam adalah salah satu daerah rawan bencana di Provinsi Sumatera Barat. Struktur geografis daerah sangat mudah mendapat bencana longsor dan banjir di beberapa kawasan. Bencana alam yang terjadi

di Kabupaten Agam dapat dikaitkan dengan kerusakan lingkungan akibat maraknya praktek *illegal logging* di daerah dataran tinggi.

- Kawasan Danau Maninjau juga tidak terlepas dari pencemaran air, sehingga menimbulkan kerugian yang cukup besar terhadap budidaya ikan di perairan danau. Pencemaran air Danau Maninjau tercatat sebagai salah kasus pencemaran terbesar di provinsi Sumatera Barat.

F. Pemerintahan

- Undang-undang tentang “*Sistem Pemerintahan Daerah*” telah memberikan hak otonomi luas bagi pengembangan daerah. Setelah otonomi daerah dilaksanakan, tujuan yang hendak dicapai dengan otonomi daerah tersebut masih jauh dari harapan. Peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat, efisiensi pengelolaan keuangan daerah dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan belum begitu terlihat.
- Pengembangan sarana dan prasarana untuk menjalankan roda pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat dan penataan kelembagaan pemerintahan belum terlaksana dengan baik.
- Proses penyusunan dan pengesahan APBD setiap tahunnya mengalami keterlambatan dari jadwal yang ditetapkan oleh aturan yang berlaku. Akibat proses penyusunan APBD yang tidak taat aturan ini telah menyebabkan anggaran kinerja belum terlaksana sebagaimana mestinya. Keterlambatan pengesahan APBD telah menimbulkan berbagai penyimpangan dalam pelaksanaan APBD.
- Struktur penerimaan daerah sangat tergantung dari transfer dana (dana perimbangan). Sumbangan PAD terhadap penerimaan daerah rata-rata di bawah 5 % selama periode 2001-2004.
- Peranan DPRD belum melaksanakan fungsinya secara maksimal. Hak dan kewajiban DPRD belum terlaksana sebagaimana yang ditetapkan oleh aturan yang berlaku. Akibatnya kinerja DPRD sering tidak seperti yang diharapkan rakyat yang memilihnya.
- Koordinasi pelaksanaan anggaran menurut unit kerja juga belum berjalan dengan baik. Akibat rendahnya tingkat koordinasinya antar unit pelaksana menyebabkan efektivitas untuk mencapai tujuan pembangunan belum maksimal.

- Sampai saat ini Kabupaten Agam belum mempunyai peraturan daerah tentang pengelolaan keuangan daerah dan standar pelayanan umum. Akibatnya pengukuran kinerja pelayanan yang dilaksanakan oleh setiap unit pelaksana belum dapat terlaksana dengan baik.
- Pengeluaran pemerintah terkonsentrasi untuk pelaksanaan pelayanan fungsi pemerintahan umum dan pendidikan. Alokasi anggaran untuk kedua bidang ini hampir mencapai 50 % dari total APBD setiap tahunnya.

2.2. Tantangan Pembangunan

A. Pemanfaatan Potensi

Kabupaten Agam memiliki potensi sumberdaya alam dan sumberdaya manusia untuk mendukung pembangunan di masa mendatang. Sumberdaya alam dan sumberdaya manusia yang tersedia belum tereksplorasi secara maksimum. Luas lahan yang tidak dimanfaatkan dan tingginya tingkat setengah pengangguran di Kabupaten Agam dapat memberi indikasi belum termanfaatkannya potensi sumberdaya alam dan sumberdaya manusia yang tersedia. Oleh sebab itu tantangan pembangunan di masa mendatang adalah bagaimana memaksimalkan potensi sumberdaya alam dan sumberdaya manusia untuk mempercepat peningkatan kesejahteraan penduduk.

B. Bidang Sosial

Laju pertumbuhan penduduk Kabupaten Agam relatif rendah. Secara umum laju pertumbuhan yang rendah ini perlu dipertahankan. Jika laju pertumbuhan penduduk yang tinggi tidak diimbangi dengan perluasan kesempatan kerja, penyediaan sarana dan prasarana akan dapat menimbulkan masalah sosial dan ekonomi.

Tantangan selanjutnya adalah meningkatkan fungsi rumah ibadah sebagai tempat ibadah, kegiatan sosial dan ekonomi masyarakat. Jika semua fungsi ini dapat berjalan dengan baik, maka tingkat kemiskinan dan masalah sosial masyarakat yang muncul dapat dikurangi.

Perantau Kabupaten Agam tersebar ke seluruh nusantara. Potensi yang dimiliki oleh perantau tersebut cukup besar untuk menggerakkan ekonomi

Sumatera Barat. Oleh sebab itu peningkatan memanfaatkan potensi perantau untuk memaju ekonomi kampung harus digalang sedemikian rumah.

C. Bidang Ekonomi

Tantangan terberat pembangunan bidang ekonomi adalah merubah kedudukan perekonomian Kabupaten Agam dalam konteks Sumatera Barat. Kedudukan Kabupaten Agam sebagai daerah terkebelakang (laju pertumbuhan ekonomi dan pendapatan per kapita rendah) harus dirubah menjadi daerah maju (laju pertumbuhan ekonomi dan pendapatan per kapita di atas rata-rata Sumatera Barat).

Struktur ekonomi yang tidak mengalami perubahan selama sepuluh tahun terakhir harus diupayakan agar menyamai struktur ekonomi negara-negara maju. Sektor industri pengolahan harus lebih cepat berkembang dari peningkatan jumlah penawaran tenaga kerja. Oleh sebab itu tantangan yang cukup besar di masa mendatang adalah merubah struktur ekonomi Kabupaten Agam yang dapat meningkatkan pendapatan secara keseluruhan.

Tingkat kemiskinan yang relatif tinggi di Kabupaten Agam perlu ditanggulangi dengan berbagai cara. Tingkat kemiskinan yang tinggi dapat mencerminkan ketidak berhasilan pembangunan di berbagai bidang. Namun pertumbuhan ekonomi adalah persyaratan utama untuk mengurangi kemiskinan. Oleh sebab itu pertumbuhan ekonomi Kabupaten Agam untuk masa mendatang perlu berpihak kepada kepentingan kelompok miskin atau manfaat pembangunan harus lebih banyak dirasakan oleh kelompok masyarakat berpendapatan rendah dan menengah.

Tantangan pembangunan selanjutnya adalah mengurangi angka setengah pengangguran di Kabupaten Agam. Angka setengah pengangguran yang masih tinggi saat ini merupakan pemborosan sumberdaya manusia dalam pembangunan. Oleh sebab itu pengurangan angka setengah pengangguran harus menjadi salah satu agenda utama pembangunan Kabupaten Agam di masa mendatang.

Kabupaten Agam tidak akan dapat memanfaatkan atau meningkatkan kegiatan ekonomi tanpa bekerjasama dengan daerah lain. Kegiatan ekonomi Kabupaten Agam mempunyai keterkaitan dan ketergantungan dengan kegiatan ekonomi Kota Bukittinggi, Padang Pariaman dan Kota Payakumbuh. Industri

pengolahan hasil pertanian lebih banyak berada di Kota Bukittinggi dan Kota Payakumbuh. Oleh sebab itu peningkatan kerjasama ekonomi antar daerah sangat diperlukan.

D. Infrastruktur, Permukiman dan Lingkungan

Pembangunan infrastruktur sangat diperlukan untuk menunjang kegiatan produksi dan distribusi hasil produksi. Infrastruktur yang tersedia saat ini masih belum mencukupi baik dari segi jumlah maupun kualitas. Peningkatan permintaan sarana dan prasarana umum akan mengalami peningkatan sejalan dengan peningkatan jumlah penduduk dan pendapatan masyarakat. Salah satu tantangan pembangunan bidang infrastruktur di masa mendatang adalah mengurangi ketimpangan ketersediaan sarana dan prasarana antara kecamatan dan antara Kabupaten Agam Bahagian Timur dengan Kabupaten Bahagian Barat dan meningkatkan kualitas sarana dan prasarana yang tersedia untuk menunjang kegiatan ekonomi.

Tantang pembangunan selanjutnya adalah mengurangi dan mengatasi bencana alam, kerusakan lingkungan dan pencemaran air danau. Hal ini bertujuan untuk mengurangi frekuensi bencana alam di masa mendatang. Upaya pembangunan bidang lainnya tidak akan ada artinya jika frekuensi bencana alam mengalami peningkatan. Bencana alam akan dapat menghancurkan infrastruktur dan kegiatan perekonomian daerah. Oleh sebab itu stigma Kabupaten Agam sebagai daerah rawan bencana alam harus dikurangi dengan berbagai upaya.

E. Bidang Pemerintahan

Tantangan yang terberat bidang pemerintahan di masa mendatang adalah membuktikan kualitas pelayanan publik, pengelolaan keuangan daerah dan efisiensi pelaksanaan pembangunan pada era otonomi daerah lebih baik dari era sentralisasi. Otonomi daerah yang telah dilaksanakan selama lima tahun terakhir belum banyak membawa peningkatan terhadap kualitas pelayanan publik, pengelolaan keuangan daerah dan efisiensi pelaksanaan pembangunan. Jika tidak terjadi perubahan terhadap tiga aspek yang dikemukakan ini maka partisipasi masyarakat untuk menunjang kegiatan pemerintah juga tidak akan mengalami peningkatan.

Penerimaan daerah sangat tergantung dari transfer pemerintah pusat. Pada tahun 2007 akan terjadi perubahan formula dana alokasi umum (DAU), dimana jumlah pegawai negeri tidak akan menjadi variabel penentuan alokasi dana alokasi umum. Oleh sebab itu tantangan yang terberat dalam keuangan daerah di masa mendatang adalah mengurangi ketergantungan penerimaan dari transfer pemerintah pusat dengan cara meningkatkan penerimaan pendapatan asli daerah (PAD).

Kemudian pemerintah telah mengeluarkan berbagai undang-undang tentang pengelolaan keuangan negara mulai dari perencanaan sampai kepada pemeriksaan. Semua undang-undang tersebut telah mengakibatkan terjadinya reformasi dalam pengelolaan keuangan daerah. Reformasi ini menuntut peningkatan kemampuan aparatur pengelola keuangan daerah dan anggota DPRD sebagai legislator penggunaan keuangan daerah.

Selanjutnya peningkatan investasi swasta sangat tergantung dari sistem dan kualitas pelayanan serta insentif yang disediakan pemerintah daerah. Investasi akan lari ke daerah yang banyak mendapat keuntungan dan birokrasi pemerintahan yang tidak menimbulkan ongkos transaksi yang tinggi. Oleh sebab itu tantangan bidang pemerintahan adalah meningkatkan kualitas pelayanan tanpa mengakibatkan peningkatan ongkos transaksi dan menyediakan berbagai insentif untuk menarik investasi swasta.

Struktur pemerintahan sangat menentukan keberhasilan pencapaian tujuan pembangunan daerah dan penyediaan pelayanan publik. Kemudian untuk menghadapi persaingan antar daerah dan globalisasi serta tuntutan masyarakat terhadap peningkatan kualitas pelayanan dibutuhkan aparatur pemerintah yang berkualitas, berinovasi dan berkreasi. Oleh sebab itu tantangan bidang pemerintahan selanjutnya adalah membentuk struktur pemerintahan daerah yang efisien, efektif dan diisi oleh aparatur pemerintah yang berkualitas.

VISI, MISI, DAN TUJUAN

3.1. VISI

Sesuai kondisi objektif Kabupaten Agam yang ada pada saat ini dan tantangan yang akan dihadapi dalam 20 tahun mendatang serta memperhatikan potensi yang tersedia, maka Visi Kabupaten Agam 2005-2025 yang dirumuskan adalah **“Agam Mandiri dan Berprestasi Madani”**. Agam mandiri mengandung arti kemandirian yang mengakar dari nilai agama, sosial budaya dan potensi daerah di segala bidang dengan tetap menjunjung tinggi kebersamaan dan kemitraan dengan semangat persatuan dan kesatuan **“Barek Sapikua Ringan Sajinjiang didukung oleh Tali Tigo Sapilin”**.

Berprestasi mengandung adanya suatu dorongan, bagi pemerintah dan masyarakat Kabupaten Agam dalam melaksanakan tugas, fungsi, tanggung jawab dan usaha sehingga dapat memberikan hasil yang optimal dan terbaik. Untuk terwujudnya hal tersebut dituntut kreatifitas, inovasi dan proaktif dari setiap lapisan masyarakat dalam memanfaatkan setiap peluang yang ada serta mengatasi tantangan sehingga mampu berkompetisi di tingkat lokal, regional, maupun internasional.

Dengan demikian, Agam Mandiri dan Berprestasi mengandung makna sejalan dengan prinsip kehidupan, hari ini harus lebih baik dari hari kemarin, dan hari esok harus lebih baik dari dahi ini. **“Tiada hari tanpa prestasi, Tiada Prestasi Tanpa Kemandirian”**. Situasi ini akan menggambarkan gairah kerja yang kondusif dalam masyarakat.

Madani diambil dari nilai-nilai yang telah dikembangkan oleh Nabi Muhammad SAW dalam menjalankan pemerintahan dan menata masyarakat di kota Madinah. Di antara nilai-nilai yang dikembangkan tersebut mengandung nilai-nilai dasar kehidupan masyarakat yang didasarkan kepada prinsip kesetaraan, musyawarah dan mufakat, nilai ukhwah, memupuk rasa cinta tanah air pengakuan terhadap hak azazi setiap manusia. Dengan demikian penerapan Agam Madani

akan menjadi masyarakat yang berwawasan kebebasan, keadilan, partisipasi dan egalitarian.

3. 2. MISI

Misi adalah penjabaran lebih rinci dari visi yang ingin dicapai untuk mewujudkan “Agam Mandiri dan Berprestasi yang Madani” ditetapkan misi seperti berikut:

- a. Mewujudkan kehidupan beragama dan norma adat berlandaskan prinsip Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah, Syarak Mangato, Adat Mamakai
- b. Mewujudkan tata pemerintahan yang baik (*good governance*) yang bebas dari praktek korupsi, kolusi dan nepotisme.
- c. Mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas melalui pendidikan formal dan informal, peningkatan pelayanan dalam bidang kesehatan, serta pembinaan generasi muda dan olah raga.
- d. Mewujudkan masyarakat yang sejahtera sesuai potensi dan kondisi daerah berdasarkan filosofi “oleh rakyat untuk rakyat”. Pemerintah akan berfungsi sebagai regulator dan pemberi dorongan atau insentif sesuai kemampuan yang ada.
- e. Mewujudkan pemerataan sarana dan prasarana perekonomian untuk mempercepat pencapaian Agam mandiri yang madani.

3. 3. Tujuan

Tujuan akhir yang ingin diwujudkan oleh visi dan misi itu adalah untuk mewujudkan masyarakat Agam yang **“bahagia dan sejahtera”**. **Bahagia** mencakup tatakrama kehidupan berumah tangga, bernagari dan berdaerah. Terciptanya hubungan kekerabatan yang betul-betul sesuai dengan aturan-aturan yang berlaku, baik tertulis maupun tidak tertulis, baik formal maupun informal. Sementara **sejahtera** berarti kebahagiaan yang diukur dari sisi ekonomi.

Masyarakat bahagia dapat memenuhi tuntutan mandiri dan berprestasi madani. Kebahagiaan muncul dari hubungan kekerabatan yang tertata secara apik. Hubungan kekerabatan yang tertata secara apik akan meningkatkan sifat tolong-menolong, sifat kegotongroyongan dan sifat menghargai satu sama lainnya. Hubungan ini tidak saja terbatas pada individu dengan individu, atau kelompok orang dengan kelompok individu lain, tetapi juga antar kelembagaan

Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Kabupaten Agam Tahun 2006-2025 18

pemerintahan atau antar lembaga pemerintah dengan masyarakat. Dengan demikian semua keputusan publik akan dapat diterima dan dilaksanakan sebagaimana mestinya oleh semua pihak yang terkait dengan keputusan tersebut. Akhirnya akan dapat diwujudkan “pembangunan oleh rakyat dan untuk rakyat”.

Tatakrama ini telah mulai dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah dalam mengambil keputusan publik. Pemerintah Daerah dalam pengambilan keputusannya secara bertahap telah mulai mengikut sertakan Pemerintahan Nagari, Ninik Mamak, *Cadiek Pandai*, Bundo Kandung dan Lembaga kemasyarakatan lainnya. Musyawarah daerah adalah merupakan wadah yang sesuai untuk mencapai tujuan tersebut. Pola pengambilan keputusan publik seperti ini akan terus disempurnakan sesuai tuntutan “good governance” dan UU 32/2004 dalam pelaksanaan otonomi daerah yang berbasis kabupaten-kota.

Kata **bahagia** sesuai pula dengan Piagam Madinah yang menganut wawasan kebebasan, keadilan, partisipasi dan egalitarian. Konsep kebebasan tidak berarti “semau gue”, tetapi bebas dalam kerangka aturan yang ada, baik bersifat aturan bidang keagamaan maupun aturan yang bersifat kenegaraan.

Adil merupakan sebuah konsep yang sulit di terjemahkan secara tepat, sebab dia dapat dilihat dari dua sisi yang saling meniadakan satu sama lain. Pada satu sisi, orang atau kelompok yang berjasa besar adil jika dia atau kelompoknya memperoleh imbalan lebih besar di bandingkan dengan orang atau kelompok yang berjasa kecil. Pada sisi lain, adil jika anggaran yang tersedia dibagi secara merata untuk setiap unit kerja yang terkait kepada anggaran tersebut. Akan lebih tepat menterjemahkan adil tersebut tidak persis sama dari kedua sisi tersebut. Musyawarah mufakat yang telah dijadikan sebagai dasar pengambilan keputusan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Agam adalah merupakan konsep yang tepat. Setiap orang atau pengusaha atau golongan bertindak sesuai fungsinya masing-masing. Mamak bertindak sebagai mamak dan bertanggung jawab terhadap akan kemenakan. Tidak ada yang merasa mempunyai kekuasaan yang absolut. Keputusan yang dihasilkan merupakan keputusan hasil msyawarah, atau disebut juga sebagai keputusan bersama. Keputusan bersama yang berlandaskan kepada musyawarah ini disebut sebagai adil.

Oleh karena keputusan publik merupakan keputusan bersama, semua unsur sudah terlibat dalam pengambilan keputusan tersebut, maka rasa kepemilikan mereka meningkat. **Rasa kepemilikan** ini adalah merupakan bahagian yang penting bagi peningkatan **partisipasi** masyarakat dalam pembangunan. Partisipasi yang tinggi akan dapat mewujudkan konsep pembangunan “oleh rakyat untuk rakyat”. Selanjutnya, alasan efisiensi dalam pemberian otonomi kepada daerah akan terwujud dengan sendirinya.

Sedangkan konsep **egalitarian** yang bermakna kebersamaan, secara tidak langsung dicakup oleh kebebasan, keadilan dan partisipasi. Sehingga dengan demikian, kesemua wawasan yang terdapat dalam Piagam Madinah tersebut adalah saling berhubungan satu sama lain. Kebebasan tidak dapat dipisahkan dari keadilan, keadilan tidak terpisahkan dari partisipasi. Begitu juga dengan konsep egalitarian. Makna dari keseluruhan rumusan tersebut adalah “**bahagia**” dunia dan akhirat.

Selanjutnya kata **sejahtera** diartikan dalam batasan ekonomi. Ia dapat diukur dengan kekayaan yang dimiliki. Sejahtera dapat diukur dengan uang yang dimiliki dari hasil karyanya. Semakin besar kekayaan yang dimiliki oleh seseorang atau sebuah rumah tangga, atau sekelompok orang, semakin sejahtera orang atau rumah tangga atau kelompok orang tersebut.

Sejahtera itu tidak datang begitu saja. Ia merupakan prestasi kerja baik dilihat dari sisi perorangan maupun ditinjau dari segi kelompok orang atau lembaga. Semakin tinggi prestasi kerja orang atau lembaga semakin tinggi tingkat kesejahteraan orang atau lembaga yang bersangkutan. Sebaliknya tentu akan terjadi pula. Orang atau lembaga yang malas akan berprestasi rendah akan memiliki kesejahteraan rendah pula.

Ada kaitan positif antara bahagia dengan sejahtera. Bahagia akan dapat meningkatkan prestasi kerja dan sekaligus akan meningkatkan kesejahteraan. Sedangkan sejahtera belum tentu akan menghasilkan kebahagiaan. Oleh karena itulah kata bahagia ditempatkan didepan kata sejahtera. Penempatan kata sejahtera didepan bahagia tidak akan memberikan hasil yang optimal.

Tujuan yang hendak dicapai adalah untuk meningkatkan pendapatan per kapita menjadi 2 (dua) kali lipat dalam periode 12-13 tahun pada tahap awal. Sedangkan untuk tahap berikutnya kebutuhan waktu ini akan diperpendek menjadi 10-12 tahun. Disamping itu jumlah pengangguran dan penduduk miskin akan dikurangi sampai pada tingkat minimum. Peningkatan pendapatan, pengurangan jumlah pengangguran dan penduduk miskin ini harus sejalan dengan tujuan penciptaan kebahagiaan dan tata kehidupan yang harmonis antar berbagai kelembagaan yang ada. Kesemua tatanan ini akan menjamin keberlanjutan pelaksanaan pembangunan daerah.

BAB 4

ARAH PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG 2005-2025

Untuk mencapai tujuan pembangunan jangka panjang yang telah ditetapkan, maka pembangunan jangka panjang Kabupaten Agam dalam 20 tahun mendatang diarahkan untuk mencapai sasaran-sasaran pokok sebagai berikut:

4.1. Terwujudnya Kehidupan Beragama dan Norma Adat Berlandaskan Prinsip Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah, Syarak Makato, Adat Memakai

Selama ini kehidupan beragama dan adat telah berjalan dengan baik di Kabupaten Agam. Namun dalam kehidupan sehari-hari perilaku dan tindakan sebahagian besar masyarakat masih bertentangan dengan ajaran-ajaran agama dan norma adat. Kehidupan beragama dalam bentuk ritual keagamaan dan penampilan fisik seperti berpakaian telah banyak mengalami perubahan. Bangunan fisik tempat ibadah seperti mesjid dan mushala sudah banyak yang megah dan bagus di Kabupaten Agam. Namun sebahagian besar masyarakat dalam berperilaku dan bertindak masih banyak yang bertentangan dengan ajaran agama dan norma adat. Perilaku menjelek-jelekan kelompok, aliran pengajaran agama, suku dan menyalahkan orang lain tanpa dasar yang jelas masih berkembang. Masyarakat di sekitar daerah perkebunan besar di Kabupaten Agam sering diprovokasi, sehingga bentrokan antara aparat keamanan dan masyarakat sering terjadi.

Agar masyarakat dapat bertindak dan berperilaku sesuai dengan tuntunan agama dan norma adat, maka pembangunan bidang kehidupan beragama dan adat diarahkan untuk mencapai sasaran pokok sebagai berikut:

- 1) Terwujudnya masyarakat cinta damai, toleransi, benci terhadap kekerasan dan menjunjung tinggi hubungan kekerabatan yang sesuai dengan aturan agama dan adat yang berlaku.
- 2) Terbenahinya semua tempat-tempat ibadah dengan baik
- 3) Setiap nagari mempunyai mesjid nagari yang memenuhi standar yang ditetapkan dan mendapat dukungan dana operasional dari pemerintah daerah.

- 4) Meningkatnya anggota masyarakat yang melaksanakan solat berjemaah di mesjid-mesjid.
- 5) Meningkatnya peranan mesjid dalam membina ekonomi dan sosial umat.
- 6) Setiap nagari mempunyai badan amil zakat yang mempunyai standar operasional yang jelas.
- 7) Berkurangnya acara-acara adat yang diadatkan yang bertentangan dengan syarak dan prinsip hubungan antara manusia dengan manusia secara universal.
- 8) Terbundungnya pengaruh perkembangan sosial yang dapat meruntuhkan kehidupan beragama dan menghancurkan norma-norma adat.
- 9) Meningkatnya peranan Ninik Mamak, Cadiak Pandai, Alim Ulama, dan Bundo Kandung dalam setiap aktivitas pembangunan dan kehidupan bermasyarakat
- 10) Berkurangnya jumlah sengketa tanah kaum yang diselesaikan di pengadilan

4.2. Terwujudnya Tata Pemerintahan Yang Baik

Tata pemerintahan mencakup bidang hukum, politik, keamanan dan ketertiban. Kesemua ini bertujuan untuk mendukung operasional dinas, badan, dan kantor dalam pelaksanaan kegiatannya untuk mewujudkan visi "Agam Mandiri dan Berprestasi Madani". Keberhasilan atau kegagalan dinas, badan, dan kantor dalam mewujudkan visi Kabupaten Agam yang sangat dipengaruhi oleh keberhasilan pelaksanaan kebijakan dalam bidang pemerintahan ini. Untuk meningkatkan kinerja masing-masing instansi pelaksana, sasaran-sasaran pokok bidang pemerintahan diarahkan untuk mencapai hal-hal berikut:

- Terwujudnya sistem pemerintahan yang demokratis, efisien, transparan, dan aktualisasi
- Meningkatnya peranan kontrol sosial baik dari institusi pemerintahan yang ada maupun dari lembaga non-pemerintahan.
- Tegaknya supremasi hukum, dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara serta menghormati hukum agama dan hukum adat yang berkembang.

- Terkelolanya keuangan daerah dengan tertib, taat pada peraturan perundang-peundangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.
- Meningkatnya keberdayaan masyarakat baik dalam bidang penentuan kebijakan publik, maupun untuk perbaikan kesejahteraan masyarakat.
- Terwujudnya rasa aman baik bagi masyarakat maupun terhadap pengusaha untuk berusaha/bekerja di daerah bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat.
- Terwujudnya penggunaan lahan sesuai dengan peruntukannya
- Terlaksananya perlindungan sosial bagi masyarakat yang rentan seperti yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 32/ 2004 tentang Pemerintahan Daerah

4.3. Terwujudnya Sumberdaya Manusia Yang Berkualitas

Peningkatan kualitas SDM (Sumber Daya Manusia) yang berkelanjutan merupakan sasaran jangka panjang yang ingin diwujudkan. Perwujudan sasaran ini akan mendukung tercapainya visi Agam yang telah dicanangkan yaitu “Agam Mandiri dan Berprestasi Madani” yang diterjemahkan kepada Masyarakat Agam yang “Bahagia dan Sejahtera”. Semakin tinggi kualitas SDM, semakin tinggi daya saing penduduk tersebut yang akan dapat membuka peluang bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat Agam.

Pembangunan yang berkaitan dengan peningkatan kualitas manusia diarahkan untuk mencapai sasaran pokok sebagai berikut:

- 1) Tercapainya indek pembangunan manusia (IPM) di atas 80 pada akhir 2025
- 2) Terwujudkan masyarakat yang lebih mementingkan prestasi kerja dari imbalan materi.
- 3) Meningkatnya kewaspadaan terhadap kemungkinan terjadinya wabah penyakit menular.
- 4) Tercapainya pertumbuhan penduduk tumbuh seimbang
- 5) Terjadinya peningkatan dan perubahan peranan KB terhadap pembangunan daerah

- 6) Tercapainya proses belajar dan mengajar Sekolah Dasar, SMP dan SMA/SMK berdasarkan standar nasional secara merata di seluruh wilayah Kabupaten Agam.
- 7) Terlaksananya pembinaan tulis baca Al-Quran untuk berbagai jenjang pendidikan dalam rangka penerapan nilai-nilai ABS-SBK secara konsisten.
- 8) Terpeliharanya dan lestariannya budaya daerah bagi peningkatan proses pembangunan daerah
- 9) Terpeliharanya dan lestariannya peninggalan-peninggalan sejarah yang mengandung nilai-nilai kejuangan dan kepeloporan guna menumbuh kembangkan semangat perjuangan dan cinta tanah air
- 10) Terwujudnya pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang dapat mendorong kegiatan ekonomi masyarakat
- 11) Tercapainya kesetaraan jender berdasarkan azas kemanusiaan dan keadilan
- 12) Terwujudnya generasi muda yang berperan dalam pembangunan daerah dan berprestasi dalam bidang olahraga dan kesenian pada tingkat provinsi dan internasional

4.4. Terwujudnya Masyarakat Yang Sejahtera Sesuai Dengan Potensi dan Kondisi Daerah

Peningkatan nilai tambah (pendapatan) masyarakat yang diukur dengan pertambahan nilai PDRB baik total maupun per-kapita yang berkelanjutan merupakan sasaran pembangunan daerah dalam bidang ekonomi. Peningkatan nilai tambah ini berhubungan langsung dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat yang merupakan bahagian dari terjemahan visi Agam yaitu "Bahagia dan Sejahtera" Semakin tinggi peningkatan nilai tambah semakin cepat peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Untuk mewujudkan masyarakat Kabupaten Agam yang sejahtera dalam 20 tahun mendatang, maka pembangunan bidang ekonomi diarahkan untuk mencapai sasaran-sasaran pokok sebagai berikut:

- 1) Tercapainya peningkatan pendapatan per kapita tiga kali lipat dari keadaan 2005 dengan laju pertumbuhan 4-6 % setiap tahunnya.
- 2) Meningkatnya peranan sektor industri pengolahan dua kali lipat dari keadaan 2005

- 3) Terjadinya diversifikasi kegiatan ekonomi, jenis produk dan daerah pemasaran
- 4) Termanfaatkannya sumberdaya perikanan dan kelautan secara optimal.
- 5) Terhapusnya hambatan mobilitas barang dan orang antar daerah
- 6) Berkurangnya tingkat setengah pengangguran menjadi setengah dari keadaan tahun 2005
- 7) Berkurangnya tingkat kemiskinan menjadi 5 % pada tahun 2025

4.5. Terwujudnya Pemerataan Sarana dan Prasarana Perekonomian Untuk Mempercepat Pencapaian Agam Mandiri yang Madani

Pelayanan dalam bidang prasarana dan lingkungan adalah bersifat langsung dinikmati oleh masyarakat. Sedangkan manfaatnya bagi masyarakat bersifat tidak langsung. Bidang ini berperan penting dalam mewujudkan visi kabupaten Agam melalui peningkatan ekonomi dan mendukung peningkatan kualitas SDM.

Ada tiga bidang pemerintahan yang termasuk pada bahagian ini yaitu: (1) bidang Pekerjaan Umum, (2) bidang Perhubungan, dan (3) bidang Lingkungan Hidup. Arah kebijakan pembangunan jangka panjang dalam bidang ini adalah sebagai berikut:

- 1) Meningkatnya penyediaan dan kualitas jalan sesuai kebutuhan
- 2) Meningkatnya pelayanan dalam bidang penyediaan air bagi lahan pertanian
- 3) Meningkatnya pemeliharaan sungai, danau dan sumber air lainnya bagi keberlanjutan pemanfaatannya.
- 4) Meningkatnya keamanan dan ketertiban umum dalam bidang perhubungan.
- 5) Menurunnya kerusakan lingkungan dengan cara meningkatkan pengawasan dan penerapan sanksi.

A. Mewujudkan Kehidupan Beragama dan Norma Adat Berlandaskan Prinsip Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah, Syarak Makato, Adat Memakai

Agama dan adat merupakan dua faktor yang menentukan keberhasilan Kabupaten Agam di masa mendatang. Prinsip-prinsip yang diterapkan dalam kehidupan beragama dan pelaksanaan norma-norma adat adalah: (a) menghormati hak untuk melaksanakan kegiatan agama masing-masing, (b) mendahulukan kepentingan bersama dari pada kepentingan individu dan kelompok dan suku, (c) menjunjung

tinggi hidup bertetangga yang toleran, saling menghormati dan mengutamakan rasa kekeluargaan, (d) memfungsikan lembaga-lembaga adat dalam menyelesaikan sengketa di tingkat nagari dan memajukan ekonomi dan sosial nagari, (e) menularkan nilai-nilai kepeloporan, keperintisan dan kejuangan untuk mempercepat proses pembangunan daerah.

B. Mewujudkan Tata Pemerintahan Yang Baik

Pemerintahan yang baik adalah persyaratan yang diperlukan untuk memajukan daerah dan meningkatkan kesejahteraan rakyat. Prinsip pelaksanaan pemerintahan yang harus diterapkan adalah: (a) meningkatkan peranan kontrol sosial baik dari institusi pemerintahan yang ada maupun dari lembaga non-pemerintahan, (b) meningkatkan keberdayaan masyarakat baik dalam bidang pentuan kebijakan publik, maupun untuk perbaikan kesejahteraan masyarakat, (c) memberi rasa aman bagi masyarakat yang berpartisipasi memberantas korupsi, kolusi dan nepotisme, (d) menertibkan pengelolaan dan pengawasan keuangan daerah, dan (e) meningkatkan peran dan fungsi lembaga legislatif untuk memajukan demokrasi dan kesejahteraan rakyat.

C. Mewujudkan Sumberdaya Manusia Yang Berkualitas

Untuk meningkatkan daya saing daerah dan menghadapi ancaman globalisasi di masa mendatang diperlukan sumberdaya yang berkualitas. Sumberdaya yang berkualitas diwujudkan dengan cara: (a) meningkatkan kompetensi dan nilai tambah setiap anak didik, (b) meningkatkan derajat kesehatan penduduk, (c) meningkatkan kualitas dan penyuluhan pelayanan publik, (d) membentuk karakter generasi muda agar mementingkan prestasi dari imbalan materil, (e) merubah pola kerja yang tidak mendukung peningkatan daya saing, (f) meningkatkan mutu tenaga kerja melalui pelatihan tenaga kerja oleh lembaga-lembaga pelatihan, (g) melestarikan dan mengembangkan kesenian anak nagari sebagai kesenian daerah untuk pencapaian pembangunan daerah.

D. Mewujudkan Masyarakat Yang Sejahtera Sesuai Dengan Potensi dan Kondisi Daerah

Sektor pertanian menyangkut hidup sebahagian besar penduduk Kabupaten Agam. Perbaikan tingkat kesejahteraan petani dengan mengembangkan sektor pertanian dengan memperhatikan prinsip-prinsip sebagai berikut: (a) meningkatkan efisiensi penggunaan lahan pertanian yang ada, (b) meningkatkan

nilai tambah sektor pertanian dalam arti luas, sesuai potensi yang ada, (c) mengembangkan komoditi pertanian yang mempunyai daya saing tinggi dan berorientasi ekspor, (d) meningkatkan penggunaan teknologi bertani yang tepat guna dan berkelanjutan, (e) mengembangkan industri perdesaan, (f) menciptakan situasi yang kondusif untuk berkelanjutan usaha dalam bidang perkebunan, (g) membangun institusi yang berkaitan dengan produksi dan pemasaran untuk mengatasi eksploitasi terhadap petani oleh rentenir, pedagang perantara dan cukong, (h) meningkatkan kelestarian hutan melalui peningkatan pencegahan kayu liar, (i) meningkatkan pemanfaatan potensi kelautan yang ada.

Selanjutnya perubahan struktur ekonomi Kabupaten Agam akan terwujud, apabila terjadi peningkatan peranan industri dalam pembentukan PDRB Kabupaten Agam. Pengembangan sektor industri sangat diperlukan untuk mencapai perubahan struktur ekonomi yang diharapkan. Prinsip pengembangan industri pengolahan adalah: (a) memperlancar arus lalu lintas barang untuk mengurangi ekonomi biaya tinggi, (b) mendorong bertumbuhnya industri pengolahan hasil-hasil pertanian, (c) menciptakan situasi yang kondusif bagi pengembangan industri kecil/menengah sesuai potensi SDM yang tersedia, terutama industri kecil/menengah yang telah tumbuh dan berkembang di daerah, (d) mencegah terjadinya persaingan yang tidak sehat antar pengusaha dalam bidang industri, (e) memberikan peluang bagi bertumbuhnya industri kepariwisataan yang sesuai dengan budaya daerah (sesuai ABS-SBK), (f) menyediakan institusi yang berkaitan dengan kegiatan produksi dan pemasaran pertanian dan (g) meningkatkan berbagai kerjasama antar daerah untuk pengembangan ekonomi daerah.

Pariwisata dapat dijadikan sebagai salah satu penggerak ekonomi Kabupaten Agam. Pengembangan bidang pariwisata perlu menerapkan prinsip-prinsip: (a) memberi peluang untuk pengembangan industri pariwisata dengan melibatkan sumberdaya lokal dan tidak menghancurkan tatanan dan norma-norma budaya lokal, (b) menyusun aturan yang jelas tentang pemanfaatan lahan atau sumberdaya alam lainnya yang digunakan sebagai kawasan pengembangan pariwisata, (c) mengembangkan pariwisata untuk jangka panjang dan tidak mengedepankan keuntungan sesaat atau dalam jangka pendek dan (d) mengoptimalkan pelayanan dan kerjasama dalam pengembangan pariwisata.

E. Mewujudkan Pemerataan Sarana dan Prasarana Perekonomian Untuk Mempercepat Pencapaian Agam Mandiri yang Madani

Prinsip-prinsip mewujudkan pemerataan sarana dan prasarana perekonomian untuk mempercepat pencapaian Agam Mandiri yang madani adalah: (a) meningkatkan pelayanan dalam bidang penyediaan air bagi lahan pertanian, (b) meningkatkan pemeliharaan sungai, danau dan sumber air lainnya bagi keberlanjutan pemanfaatannya, (c) meningkatkan keamanan dan ketertiban umum dalam bidang perhubungan, (d) meningkatkan pengawasan terhadap kerusakan lingkungan, (e) meningkatkan kualitas lingkungan perumahan dan permukiman secara merata.

PENUTUP

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJD) Kabupaten Agam Tahun 2006-2025 memuat visi, misi dan arah pembangunan daerah dalam 20 tahun ke depan, Sesuai dengan sistem perencanaan nasional yang diatur dalam UU 25/2004, Undang-undang tentang Keuangan Negara (UU 17/2003) dan PP 20/2004, RPJPD menjadi acuan dalam menyusun RPJMD, Rencana Strategis (Renstra) Satuan Kerja Perangkat Daerah (Rensta SKPD) dan penyusunan RAPBD melalui Renja-SKPD (Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah) dan RKPD. Dengan demikian Kabupaten Agam harus ditetapkan dengan Peraturan Daerah (Perda).

Keberhasilan mewujudkan visi Agam Mandiri dan Berprestasi Madani sangat tergantung dari: (a) komitmen setiap kepala daerah terpilih dalam periode 2006-2025, (b) konsistensi dokumen perencanaan daerah, (c) konsistensi kebijakan, program dan kegiatan, (d) keberpihakan kepada kepentingan rakyat, dan (e) dukungan dan partisipasi aktif semua lapisan masyarakat dan dunia usaha baik yang berada di daerah maupun yang mencari penghidupan di daerah lain.